



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BALEENDAH KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

Ayub Liu¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Zaenal Abidin³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ini dilakukan berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung terkait peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada Tahun 2021 menjadi 7,15 dari 6,91 di Tahun 2020 dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,80 di tahun 2022. Dari data tersebut peneliti berpendapat bahwa masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Strategi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dimana kunci dari penanganan kemiskinan bertumpu pada upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, pemerintah melalui dinas sosial telah mengeluarkan kebijakan melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan diantaranya program Bantuan sosial berupa Beras miskin maupun pemberian sembako dan uang tunai, disisi lain pemerintah juga memberikan bantuan pinjaman modal bergulir tanpa bunga bagi pelaku Usaha Kecil Menengah dan pelatihan ketenagakerjaa, namun demikian sebagian masyarakat belum mendapatkan bantuan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa program tersebut belum sepenuhnya mencapai sasaran yaitu menghilangkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok rakyat miskin.

Katakunci: Strategi, Pemerintah, Kemiskinan

Abstract

The research entitled Regional Government Strategy in Handling Poverty in Baleendah Subdistrict, Baleendah District, Bandung Regency was conducted based on data released by the Bandung Regency Central Statistics Agency regarding the increase in the poverty rate that occurred in 2021 to 7.15 from 6.91 in 2020 and will decrease again to 6.80 in 2022. From this data, the researcher believes that the problem that occurs in this research is the government's strategy in handling poverty where the key to handling poverty relies on the government's efforts to overcome the poverty problem experienced by the community. From the results of research conducted through interviews, the government through social services has issued policies through programs that have been and are being implemented, including the

social assistance program in the form of rice for the poor as well as providing basic necessities and cash, on the other hand the government also provides revolving capital loan assistance without interest for small and medium business actors and employment training, however, some people have not received this assistance, so researchers are of the opinion that the program has not fully achieved its target, namely eliminating poverty by fulfilling the basic needs of poor people.

Keywords: Strategy, Government, Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan klasik sekaligus modern yang terus menghantui kehidupan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di tengah arus globalisasi yang menjanjikan kemajuan dan kemakmuran, masih banyak kelompok masyarakat yang berjuang sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Fenomena ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga problem multidimensional yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, bahkan moral. Dalam konteks pemerintahan daerah, kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan sekaligus tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Bank Dunia (World Bank, 2017) mengartikan kemiskinan sebagai keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak. Artinya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga minimnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi sosial. Dalam dimensi sosial-politik, kemiskinan bahkan berimplikasi pada keterbatasan seseorang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik serta menikmati hasil pembangunan secara merata.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah padat penduduk di Jawa Barat menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 7,15 persen atau sekitar 269,2 ribu jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu

6,91 persen pada 2020. Meskipun pada 2022 menurun menjadi 6,80 persen, tren fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya tertangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, data juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Baleendah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, disertai persoalan gizi buruk, keterbatasan akses air bersih, serta ketimpangan ekonomi yang masih mencolok.

Masalah kemiskinan di Baleendah tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor penyebabnya. Pertama, ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi, di mana sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan daya saing tenaga kerja lokal rendah, sehingga sulit mengakses pekerjaan dengan upah layak. Ketiga, lemahnya infrastruktur sosial seperti sanitasi, kesehatan, dan fasilitas pendidikan, yang secara tidak langsung memperkuat lingkaran kemiskinan. Di luar itu, faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat karena banyaknya pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya aktivitas ekonomi lokal.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang kontekstual sesuai karakteristik wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial telah melaksanakan sejumlah program penanggulangan kemiskinan, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), serta pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat ketimpangan distribusi bantuan, data penerima manfaat yang tidak akurat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih pada ketepatan strategi dan sinergi

antarlembaga. Dalam konteks ini, teori Komponen Strategi yang dikemukakan oleh Hofer dan Schendel (1978) menjadi relevan untuk dianalisis. Teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu strategi ditentukan oleh empat komponen utama, yakni: (1) ruang lingkup (*scope*), yang menunjukkan arah dan batasan intervensi kebijakan; (2) pengerahan sumber daya (*resource deployment*), yaitu bagaimana pemerintah memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif; (3) keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), yakni kemampuan menciptakan nilai tambah dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi; dan (4) sinergi (*synergy*), yaitu kerja sama antarpemangku kepentingan agar kebijakan dapat berjalan secara terpadu.

Pendekatan komponen strategi ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Pemerintah daerah bukan hanya bertugas menyalurkan bantuan sosial, melainkan juga harus mengatur alokasi sumber daya, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Upaya tersebut menuntut koordinasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Baleendah, sinergi antara Dinas Sosial, aparat kelurahan, lembaga masyarakat, serta kelompok UMKM menjadi kunci untuk membangun strategi yang efektif dan berkelanjutan.

Selain teori Hofer dan Schendel, penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan Koten (dalam Salusu, 1994) tentang tipe-tipe strategi yang meliputi strategi korporasi, program, dukungan sumber daya, dan institusional. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan terintegrasi yang mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Strategi pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan semestinya tidak berhenti pada bantuan karitatif, tetapi harus mengarah pada perubahan struktural yang memungkinkan masyarakat keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.

Sebagai payung hukum, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Penempatan Terpadu bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu. Kedua regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang berpihak pada kelompok rentan melalui penyediaan layanan sosial, ekonomi, dan administrasi secara terpadu. Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Ketidaktepatan sasaran bantuan, kurangnya transparansi data, serta keterbatasan sumber daya manusia di birokrasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan sosial, sehingga menurunkan semangat kemandirian dan pemberdayaan. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendekatan strategis yang tidak hanya menolong masyarakat miskin, tetapi juga membangkitkan potensi mereka agar mampu bertransformasi menjadi pelaku pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis *Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung*. Penelitian difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah merancang dan mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparatur Dinas Sosial dan masyarakat penerima manfaat program.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada relevansinya terhadap praktik pemerintahan daerah yang lebih responsif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan memahami strategi yang digunakan pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal. Lebih jauh, hasil penelitian ini

juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, memperkuat sistem pendataan terpadu, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian strategi kebijakan publik dan manajemen pembangunan daerah. Sementara secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam memperbaiki mekanisme penanggulangan kemiskinan agar lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara holistik melalui pemahaman terhadap makna, perilaku, dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat yang terdampak. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, khususnya Dinas Sosial sebagai instansi pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta masyarakat Kelurahan Baleendah sebagai penerima manfaat program. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan kemiskinan maupun pelaksanaan program pemerintah. Informan kunci

terdiri atas pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bandung, aparat Kelurahan Baleendah, tokoh masyarakat, serta warga miskin yang menjadi peserta atau penerima bantuan sosial. Teknik pemilihan informan ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar representatif terhadap kondisi empiris di lapangan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, strategi, kendala, dan implementasi program pengentasan kemiskinan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan sosial-ekonomi, kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat miskin, serta interaksi antara pemerintah dan warga dalam konteks pelaksanaan program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan tahunan Dinas Sosial, data statistik kemiskinan, peraturan daerah, serta catatan kegiatan program sosial yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan, mengikuti model analisis dari Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah hasil wawancara dan observasi agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan yang mencerminkan strategi pemerintah daerah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Proses ini dilakukan secara siklus hingga data dinilai jenuh dan tidak lagi menghasilkan informasi baru.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan

kebenaran temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan member check, yakni mengonfirmasi hasil sementara kepada informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di kabupaten tersebut. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Baleendah memiliki karakteristik sosial ekonomi yang heterogen, tingkat kepadatan penduduk tinggi, serta menjadi salah satu fokus program penanggulangan kemiskinan daerah. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan penyusunan laporan penelitian.

PEMBAHASAN

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN BALEENDAH KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menangani kemiskinan di Kelurahan Baleendah telah dijalankan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat tercapainya tujuan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan teori Komponen Strategi menurut Hofer dan Schendel (1978), strategi tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu ruang lingkup (*scope*), pengerahan sumber daya (*resource deployment*), keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), dan sinergi (*synergy*).

1. Ruang Lingkup (Scope) Strategi Pemerintah Daerah

Ruang lingkup strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penanganan kemiskinan di Baleendah mencakup upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta peningkatan taraf hidup mereka melalui program-program bantuan sosial dan ekonomi produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial, program utama

yang dijalankan meliputi Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian sembako, bantuan beras miskin, serta program pinjaman modal bergulir tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program-program tersebut difokuskan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang terdampak ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Baleendah belum sepenuhnya menerima bantuan yang sesuai kebutuhan. Sebagian penerima merasa bantuan bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, ruang lingkup strategi pemerintah cenderung masih berada pada tataran kuratif (penanggulangan langsung), belum banyak menyentuh aspek preventif (pemberdayaan jangka panjang). Hal ini menegaskan perlunya perluasan ruang lingkup strategi yang mencakup dimensi sosial, pendidikan, dan ekonomi kreatif agar masyarakat tidak hanya “dibantu” tetapi juga “mampu”.

2. Pengerahan Sumber Daya (*Resource Deployment*)

Komponen pengerahan sumber daya merupakan salah satu indikator utama keberhasilan strategi daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan, telah mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Data penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana transfer pusat, termasuk Dana Desa dan program lintas kementerian. Meski demikian, efektivitas pengerahan sumber daya masih menghadapi tantangan. Beberapa aparatur di tingkat kelurahan mengakui keterbatasan tenaga pendamping sosial dan kurangnya pelatihan aparatur dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan. Akibatnya, terdapat ketidaktepatan sasaran karena data masyarakat miskin tidak selalu mutakhir. Selain itu, birokrasi yang panjang dalam pencairan anggaran membuat sebagian program terlambat disalurkan. Dalam konteks ini, strategi pemerintah daerah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas

kelembagaan dan sumber daya manusia agar setiap alokasi dana benar-benar berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan.

3. Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*)

Keunggulan kompetitif pemerintah daerah dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Baleendah terletak pada potensi ekonomi lokal yang cukup besar, seperti industri kecil, perdagangan tradisional, dan sektor jasa informal. Pemerintah daerah telah berupaya mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha bagi masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Salah satu contohnya adalah pelatihan menjahit, pengolahan makanan ringan, dan keterampilan usaha kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta. Namun, dalam implementasinya, pelatihan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan karena keterbatasan pendampingan pascapelatihan dan minimnya akses permodalan lanjutan. Sebagian besar peserta pelatihan kembali ke aktivitas ekonomi subsisten karena tidak memiliki modal dan jejaring pasar yang memadai. Di sisi lain, belum semua potensi ekonomi lokal dioptimalkan sebagai sumber keunggulan daerah. Padahal, jika pemerintah mampu membangun rantai ekonomi produktif berbasis lokal—misalnya melalui koperasi, usaha bersama, atau kolaborasi dengan sektor swasta—maka strategi pengentasan kemiskinan akan memiliki daya saing dan keberlanjutan yang lebih kuat.

4. Sinergi (*Synergy*) Antar Pemangku Kepentingan

Dimensi sinergi menjadi aspek penting dalam teori Hofer dan Schendel karena keberhasilan strategi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga oleh kolaborasi dengan berbagai aktor pembangunan. Dalam konteks Baleendah, sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat mulai terlihat melalui pembentukan *Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)* dan *Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)*. Kedua lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara

masyarakat dengan penyedia layanan sosial, serta membantu mempercepat proses pendataan dan penyaluran bantuan.

Meskipun demikian, tingkat koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Beberapa responden menyebutkan bahwa komunikasi antara Dinas Sosial, kelurahan, dan lembaga masyarakat masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada kolaborasi strategis. Padahal, sinergi yang efektif menuntut adanya pembagian peran yang jelas, mekanisme monitoring terpadu, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah kelurahan dan penguatan kelompok ekonomi warga agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

5. Analisis SWOT terhadap Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah di Baleendah memiliki sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sisi kekuatan (*strengths*), pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas, dukungan anggaran, serta keberadaan program sosial yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Kelemahan (*weaknesses*) muncul pada kurangnya akurasi data penerima manfaat, keterbatasan SDM, dan lemahnya mekanisme evaluasi program. Peluang (*opportunities*) dapat dilihat dari dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui program pengentasan kemiskinan nasional, potensi ekonomi lokal yang besar, serta perkembangan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk pendataan dan pemasaran produk UMKM. Sementara ancaman (*threats*) berasal dari ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial, potensi penyalahgunaan anggaran, serta ketimpangan sosial akibat perbedaan akses terhadap sumber daya.

Secara umum, strategi pemerintah daerah sudah berada pada arah yang tepat, tetapi masih memerlukan reformulasi agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program bantuan sosial perlu diimbangi dengan kebijakan penguatan ekonomi produktif, seperti

pembinaan UMKM, pelatihan digital marketing, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Selain itu, sistem pengawasan berbasis data digital perlu dikembangkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

6. Refleksi terhadap Peran Pemerintah Daerah

Dari temuan di lapangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah menjalankan fungsi-fungsi strategisnya sebagai pelayan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana mengubah paradigma masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku pembangunan. Dalam konteks ini, pendekatan *community empowerment* atau pemberdayaan komunitas perlu dijadikan orientasi utama kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya menolong masyarakat miskin, tetapi juga mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam merancang dan mengelola program sosial yang menyentuh kebutuhan nyata mereka. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Baleendah sudah memiliki fondasi kebijakan yang kuat dan arah implementasi yang jelas. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan sosial, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan menuju pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan transformatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penanganan kemiskinan di Kelurahan Baleendah telah berjalan melalui berbagai kebijakan dan program sosial, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat agar dapat mencapai hasil yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial, telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis seperti bantuan sosial

tunai, pemberian sembako, program keluarga harapan, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberian pinjaman modal bergulir bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin, terutama pasca pandemi Covid-19 yang memperburuk kesenjangan sosial dan daya beli masyarakat. Berdasarkan analisis teori Komponen Strategi Hofer dan Schendel, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi di Baleendah telah mencakup empat dimensi utama, yakni ruang lingkup, pengalokasian sumber daya, keunggulan kompetitif, dan sinergi. Pada dimensi ruang lingkup, strategi pemerintah masih berfokus pada bantuan bersifat kuratif, belum sepenuhnya menyentuh pemberdayaan jangka panjang. Dalam aspek pengalokasian sumber daya, keterbatasan aparatur dan data penerima bantuan yang kurang akurat menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan. Sementara itu, potensi keunggulan kompetitif daerah melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya akses permodalan dan pendampingan berkelanjutan. Pada aspek sinergi, kolaborasi antar instansi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sudah mulai terbentuk melalui mekanisme SLRT dan Puskesmas, namun koordinasi dan komunikasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dijalankan lebih terarah dan terpadu.

Secara umum, strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Baleendah menunjukkan arah yang positif, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan karena masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan program dan lemahnya aspek pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat basis data kemiskinan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengubah pendekatan kebijakan dari pola bantuan konsumtif menjadi pola pemberdayaan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci penting untuk menciptakan strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Cica S. D. 2016. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Hal. 106-118.

DR Bambang Rustanto M. Hum. Menangani Kemiskinan. Hal 117-119.

Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM PRESS.

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.

Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit Alfabeta. Bandung. 449 Halaman.

Tangkilian dan Hessel N. S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Alhudori, M. 2017. Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal of Economicsan business, Vol. 1 No. 1.

Allison, Michael dan Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Anita W, Sri. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Universitas Terbuka Bungin. B. 2007. Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Khairi M. W. dan Aidar, N. 2018. Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Vol. 3, No. 3.

Mamduh M Hanafi, (2011), Manajemen, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Muluk, M.R. Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. ITS Press : Surabaya.

Pratiwi. 2009. Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan. Tesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Prof. Dr. H. Drs. Vithsal Rival Zaenal, M.M., M.Ba., CRGP., CRMP. Prof. Dr. Willy Arafah, M.M., DBA. Dr. H. Irwan Kurniawan Subagia, S.E., M.M. Manajemen Strategi. Hal 24-25.

Sagala dan Syaiful. 2011. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Sari E. P. 2011. Ciri-ciri dan Faktor Kemiskinan dan Cara Penanggulangannya. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Sudaryanto, Gatot. 2010. Studi Tentang Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kabupaten Puger, Kabupaten Jember.

Taufiq A, Erowati D dan Wijaanto. 2008. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak). Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1, pp. 134-158, May 2013.

Wardana A. 2019. Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol 08, No. 12.

Wulandari N. W. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2014. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, No.1.

BPS Kabupaten Bandung. Indikator Kesejahteraan Kabupaten Bandung. Hal 3-15 Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2019-2021. (2021). Jawa Barat: Badan Pusat. Statistik Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2021. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

2014. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

2010. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.